



Masalah Sosial Permukiman Kumuh Di Kelurahan Baru Kota Palu Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Wawasan Kemasyarakatan

Yumriani^{1✉}, Suardi², Nur afni³

(1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

(2) Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: afnyraja@gmail.com^{1✉}

Abstrak

"Masalah Sosial Pemukiman Kumuh Kelurahan Baru Kota Palu ditinjau dari Perspektif Pendidikan Wawasan Kemasyarakatan" Penelitian ini bertujuan untuk : (1) melihat hubungan antara kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif pendidikan wawasan kemasyarakatan terhadap adanya pemukiman kumuh di kelurahan baru kota Palu. (2) Mendeskripsikan upaya penanganan kawasan pemukiman kumuh di kelurahan baru kota Palu. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah lingkungan Pemukiman, pemukiman kumuh dan Masyarakat Kelurahan Baru Kota Palu, Pengambilan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan antara kehidupan sosial masyarakat terhadap adanya pemukiman Kumuh; dan (2) terdapat penanganan kawasan Pemukiman Kumuh.

Kata kunci : *Masalah Sosial, Pemukiman Kumuh, Pendidikan Wawasan Kemasyarakatan*

Abstract

"Social Problems of Slum Settlements in Kelurahan Baru, Palu City in terms of Urban Sociology Education Perspective Wawasan Kemasyarakatan. This study aims to: (1) see the relationship between social life in terms of the perspective of urban Wawasan Kemasyarakatan and the existence of slum settlements in the new urban village of Palu. (2) Describe the efforts to deal with slum areas in the new urban village of Palu. The research method used is descriptive qualitative. The population in this research is the New Kelurahan People of Palu City, collecting data through observation, interviews, and documentation. The results showed (1) there is a relationship between the social life of the community and the existence of slum settlements, and (2) there is a management of slum areas.

Keywords : *Social Problems, Slum Settlements, education Wawasan kemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Masalah sosial adalah situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan akan mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya, yakni perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma-norma (Horton dan Leslie, 2018). Adapun unsur-unsur masalah sosial yaitu adanya suatu situasi atau kondisi sosial, adanya sekelompok orang yang mengevaluasi situasi atau kondisi sosial tersebut, adanya evaluasi terhadap situasi atau kondisi sosial tersebut sebagai tidak mengenakan, adanya alasan-alasan mengapa situasi atau kondisi tersebut sebagai tidak mengenakan. Salah satu permasalahan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat adalah permasalahan kawasan permukiman kumuh yang menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terselesaikan oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu yang sudah dilakukan. Secara khusus dampak kawasan permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya.

Kawasan permukiman kumuh di kelurahan Baru serupa dengan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Kawasan permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi, dan ketiga kondisi perilaku masyarakatnya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat, kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Fenomena sosial di kelurahan Baru apabila dilihat dari kondisi fisiknya mencakup kelayakan bangunan hunian yakni terdiri dari wilayah kelurahan baru yaitu daerah prioritas RT 002 RW 002, RT 003 RW 001. Dijabarkan bahwa bangunan hunian tidak memiliki kondisi atap, lantai, dinding sesuai persyaratan teknis, panjang jalan lingkungan, termasuk penghubung dengan jalan perkotaan, selanjutnya luas area permukiman sering terjadi genangan air/banjir, memiliki drainase yang minimum ideal yaitu masih jauh dari bersih dan tidak bau. Disamping itu keterbatasan pelayanan air minum dari segi ketercukupan dan kualitas air bersih untuk mandi dan cuci serta keterbatasan kepemilikan jamban pribadi milik masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang menggunakan jamban secara bersama, dari segi pengelolaan persampahan, bahkan jumlah sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman tidak terangkut ke TPS/TPA minimal dua kali seminggu sebagian besar masyarakat terutama yang berada pada daerah bantaran sungai masih membuang sampahnya langsung ke sungai. dan dengan kondisi permukiman yang padat

jarak antar bangunan yang cukup rapat sehingga menyisahkan lahan setapak untuk dijadikan akses masyarakat, hal tersebut menyulitkan akses kendaraan pemadam kebakaran sebagai bentuk sarana proteksi kebakaran.

Rasa memiliki lingkungan permukiman juga dirasa masih kurang oleh warga masyarakat kelurahan baru hal tersebut tergambar dengan pembiaran terhadap kondisi permasalahan lingkungan di sekitar tempat tinggal seperti kondisi saluran drainase yang kotor dan dipenuhi dengan sampah, sanitasi masyarakat yang hanya dibuang ke halaman belakang tanpa bak penampungan atau resapan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Disisi lain kurangnya kapasitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang di tetapkan oleh pemerintah kota menjadi salah satu faktor pembiaran tersebut.

Dengan adanya harapan dan kenyataan yang tidak beriringan dan sejalan, yakni harapan atas terciptanya masyarakat dengan kesadaran bermasyarakat dengan memahami perlunya pemukiman layak huni yakni kondisi ketidakteraturan bangunan, serta melihat hubungan kemasyarakatan dan sebuah masalah sosial dari perspektif pendidikan wawasan kemasyarakatan, sedangkan kenyataan yg terjadi dilapangan bahwa di Kelurahan baru kota Palu berada dikategori kumuh sedang, maka judul ini penting untuk dilakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjadikan lingkungan sebagai sumber data. Penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang berupaya untuk menemukan, menggambarkan serta menjelaskan kondisi suatu objek, sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang berupaya menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang atau lembaga dan lainnya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan apa adanya. Menurut (Hermawan 2019:100) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Lokasi penelitian dilakukan di RT 002 RW 002, RT 003 RW 001, Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, peneliti memilih lokasi ini karena merupakan lokasi prioritas kawasan permukiman kumuh yang menjadi fokus penanganan oleh pemerintah kota dan termuat dalam SK kawasan kumuh kota palu,

serta berdasarkan observasi awal dan pengamatan yang dilakukan peneliti terlihat bahwa kondisi permukiman masyarakat kelurahan baru tampak lebih padat, kondisi lingkungan sangat kotor dan terlihat lebih kumuh. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Baru.

Teknik penelitian yang digunakan yaitu dengan metode observasi, dan wawancara yang dilakukan di tingkat masyarakat dengan mengacu pada data dasar kekumuhan tingkat kelurahan, Observasi dilakukan pada lokasi prioritas dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi terkait indikator kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, sanitasi masyarakat, persampahan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokasi penelitian, dalam pelaksanaan observasi perlu juga dilakukan wawancara atau penggalian terkait faktor-faktor penyebab kekumuhan berdasarkan kondisi yang nampak sehingga dapat ditemukan akar masalah penyebab kekumuhan.

Teknik penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang sudah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah berupa : a. Observasi yang merupakan teknik pengumpulan data melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan datang langsung ke Kelurahan Baru Kota Palu, dimana peneliti ingin mengetahui apakah tanpa kehadiran subjek berperilaku tetap atau menjadi berbeda. Menurut Mamik (2015:104) observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan; b. Wawancara, Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian kualitatif. Dalam teknik ini, penulis melakukan wawancara yang menjadi sasaran adalah ketua BKM Kelurahan Baru, Kelurahan Baru, RT/RW dan masyarakat Kelurahan Baru. Menurut (Sugiyono 2016:317) bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam; c. Studi Dokumentasi, yaitu mengadakan penyajian terhadap dokumen-dokumen yang dianggap mendukung hasil penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik berada di BKM ataupun yang berada di Kelurahan Baru, yang ada hubungannya dengan permukiman kumuh di Kelurahan Baru. Menurut I Wayan Suwendra (2018:65) bahwa teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.

Teknik analisis data adalah teknik deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data berbagai data yang didapatkan dari berbagai literatur

yang berhubungan dengan penelitian ini maupun data penelitian lapangan dalam bentuk deskriptif yang utuh. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut : 1. Reduksi Data diterapkan pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informan, basa-basi, dan sejenisnya. (Sugiyono 2016:339) bahwa: Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan; 2. Penyajian Data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. (Sugiyono 2016:341) bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sejenisnya; 3. Verifikasi Data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut.

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu : a. Deduktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat umum, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus; b. Induktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum; c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah BKM (Badan Koordinasi Masyarakat) dan data dari Kantor Kelurahan Baru Kota Palu serta informasi Masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang sama belum pernah ada sebelumnya, dijelaskan bahwa Rumah merupakan institusi budaya, bukan saja sebagai hasil kegiatan manusia tetapi juga karena peranannya sebagai tempat dalam menampung, menyalurkan dan pengembangan usaha serta langkah menuju perbaikan taraf hidup manusia. (Budihardjo, 1984). Dengan demikian rumah dapat dilihat sebagai pusat kegiatan budaya: rumah terwujud dalam proses pemikiran dan tingkah laku. Selanjutnya ditekankan lagi bahwa rumah menunjukkan tempat tinggal, merupakan mediasi antara manusia dengan dunia, dimana manusia dapat menemukan kembali kekuatannya setelah lebih dahulu melakukan pekerjaan yang melelahkan dan menghabiskan energi. Rumah juga memberikan keamanan, ketenangan hidup, kemesraan dan kehangatan hidup serta kebebasan sosial dan psikologis.

Hidayat (2019) mengemukakan bahwa rumah merupakan basis bagi terbentuknya kepribadian manusia, rumah merupakan ekspresi dari eksistensi manusia, di rumah pulalah perilaku manusia dibentuk. Ada empat tingkat kebutuhan rumah diukur dari tingkat kepuasan yaitu: kebutuhan untuk bernaung dan rasa aman, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial dan kebutuhan estetika. Dalam bentuk materialnya suatu rumah dilengkapi dengan lantai, dinding, dan atap yang kuat merupakan tempat manusia berlindung dan diamankan dari bermacam-macam bahaya. Harianto (1987) mengemukakan bahwa rumah bukannya sekedar tempat terlindung dari terik matahari, hujan, angin dan cuaca buruk lainnya tetapi juga harus bisa memberikan kenyamanan dan ketenteraman bagi para penghuninya.

Konsep Pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat perubahan dalam dirinya dengan cara menuntut ilmu agar terjadi perubahan dalam hal pengetahuan maupun perilaku. Pendidikan pertama kali didapatkan dari lingkungan terkecil kita yaitu keluarga dan masyarakat (pendidikan informal) dan lingkungan sekolah (pendidikan formal). Menurut Hasan Basri (2013:13) bahwa "pendidikan lebih tepat diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan". Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Pendidikan juga dapat dilacak dari kata *educare* yang berasal dari *educare* yang artinya menggiring ke luar. *Educare* dapat diartikan usaha pemuliaan manusia atau pembentukan manusia. (Drost, 2006: 54) Lebih lanjut konsep pendidikan dapat diberi batasan yang berbeda-beda sesuai sudut pandangnya, antara lain: filosofis, psikologis, etis, sosiologis, dan teologis. Secara filosofis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses memanusiakan manusia lewat pembudayaan atau proses hominisasi dan humanisasi. Proses tersebut terwujud dalam mendidik dan dididik. Pendidikan harus ditelaah secara ilmiah, bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Kritis, berarti semua pernyataan dan afirmasi memiliki dasar yang kuat, metodis berarti proses berpikir dan penyelidikan dengan cara tertentu, dan sistematis berarti berdasar idea yang menyeluruh sebagai kesatuan yang saling terkait.

Secara psikologis, pendidikan adalah proses pendewasaan anak muda oleh orang dewasa yang susila. Pendewasaan tersebut terlaksana dalam bentuk lahir (pertumbuhan fisik) maupun batin (perkembangan mental). Secara etis, pendidikan merupakan proses transfer nilai-nilai kemanusiaan dalam pembentukan manusia dewasa yang susila. Secara sosiologis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses pembentukan anggota masyarakat yang berjiwa sosial, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yang berguna bagi

orang lain (kekitaan). Sedang secara teologis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses pembentukan warga surgawi (civitas Dei). Dari beberapa definisi yang dipaparkan dapat disimpulkan konsep pendidikan sebagai proses manusiawi yang terwujud dalam proses pendewasaan, pembentukan diri sendiri, menuju kedewasaan yang susila, melalui internalisasi (pembatinan, normasi) nilai-nilai kemanusiaan. Simpulan tersebut dapat diurai kembali berikut ini, Pendidikan sebagai proses manusiawi, terwujud dalam aktivitas mendidik dan dididik, yang mendidik manusia dan yang dididik manusia. Di luar manusia tidak pernah ada pendidikan, bila ditemukan istilah "pendidikan gajah" (di Lampung) hal itu pasti salah konsep, perlu dimaknai lain, yaitu "pelatihan gajah".

Proses mendidik dan dididik juga disebut sebagai proses mengajar-belajar (teaching learning), yang dewasa ini secara lebih tepat dipopularitaskan sebagai proses pembelajaran. Dikatakan "secara lebih tepat" karena dalam konsep pembelajaran dikandung makna "anak yang aktif", cara belajar siswa aktif (CBSA), yang secara konseptual mulai disosialisasikan oleh Conny R. Semiawan, yang sejalan dengan "otonomi pendidikan", strategi pembelajaran yang terpusat pada siswa (student centered, student oriented) atau pembelajaran berbasis siswa. Konsep-konsep yang disebut belakangan inilah yang menjadi rohnya pendidikan, yang sekarang, di Indonesia, banyak diingkari. Pendidikan bersifat membantu dalam tiga aspek, yaitu: individual, sosial, dan kepribadian. Secara individual, pendidikan memberikan bantuan untuk mengembangkan daya pikir (intelektual), menguasai IPTEKS, mengambil putusan, memecahkan masalah kehidupan, dan mengembangkan berbagai keterampilan. Secara sosial, pendidikan memberikan bantuan mengembangkan kebersamaan, solidaritas, kekitaan, membangun komunitas, dan memperkuat hubungan antarmanusia. Secara kepribadian pendidikan membantu membentuk kekuatan batin, seperti harga diri, percaya diri, dan harapan masa depan. (Widiastono, 2004: xxiv).

Dalam mengkaji konsep masalah sosial ditinjau dari perspektif masalah sosialnya dengan menggunakan perspektif teori yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan tentang bagaimana memandang masyarakat dan masalah sosial itu sendiri. *Teori masalah sosial oleh Earl Rubington dan Martin S. Weinberg (1995)*, dijelaskan dalam masalah-masalah sosial (Patologi sosial dan Perilaku Menyimpang) yang disebut *sebagai paradigm consensus* dan struktural fungsional.

Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu,

pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap "sakit", disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Menurut Kartini Kartono Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin kebaikan dan hukum formal. Sedangkan menurut Sigmund Freud (1856-1939), Patologi sosial adalah perilaku menyimpang yang ditandai adanya pola-pola kepribadian yang inadekuat disertai dengan pengalaman-pengalaman atau konflik-konflik ketidaksadaran antara komponen-komponen kepribadian ide, ego dan super ego. Dollard juga berpendapat bahwa Patologi sosial adalah penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh adanya agresif sebagai akibat rasa frustrasi yang muncul karena ketidakpuasan dalam diri sendiri. Kepincangan-kepincangan yang dianggap masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat-masyarakat yang pada umumnya sama, yaitu sebagai berikut : a. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan, tetapi, karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta; seorang dianggap miskin karena tidak memiliki radio, televisi, atau mobil sehingga lama-kelamaan benda-benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya; b. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.

Disorganisasi keluarga mungkin terjadi pada masyarakat-masyarakat sederhana karena kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena dia menikah lagi. Di zaman modern ini, disorganisasi keluarga mungkin terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomis. Adapun bentuk-bentuk disorganisasi keluarga menurut sosiologi antara lain: 1) Unit kegiatan yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan walaupun dalam hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, bentuk ini dapat digolongkan

sebagai disorganisasi keluarga sebab ayah (biologis) gagal dalam mengisi peranan sosialnya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu; 2) Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur; 3) Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya; 4) Krisis keluarga, karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah, mungkin karena meninggal dunia, di hukum atau karena peperangan; 5) Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga.

Patologi sosial ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1). Ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dalam menjalankan peranannya (*maladjustment*); dan (2). Kegagalan masyarakat melakukan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan warganya (*malfunction*). Disinilah ciri utama perspektif patologi sosial, bahwa permasalahan sosial selalu dicari pada kelemahan, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, masalah sosial itu selalu disebabkan oleh sesuatu yang tidak beres, karenanya perlu dilakukan pengobatan terlebih dahulu terhadap masalah yang tidak beres tersebut. Perspektif patologi sosial mengenal 3 (tiga) penyimpangan, yaitu (1) cacat (*defect*) atau bawaan lahir yang tidak bisa diajari; (2) ketergantungan (*dependent*) yang menyebabkan kesulitan menerima pengajaran; dan (3) kenakalan (*delinquent*) yang bersifat menolak pelajaran. Penyebab dari penyimpangan tersebut bisa dilatarbelakangi oleh adanya pengaruh dari nilai-nilai yang salah di lingkungannya, seperti lingkungan yang buruk akibat kepadatan penduduk, polusi, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Baik pandangan klasik maupun modern melihat bahwa penanggulangan masalah sosial adalah melalui pendidikan moral.

Perilaku menyimpang adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku menyimpang dapat terjadi di mana saja, baik di keluarga maupun di masyarakat. Menurut G. Kartasaputra, perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Menurut Mappier perilaku menyimpang disebut dengan tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah masih dianggap wajar jika hal ini terjadi pada remaja. Maksudnya, tingkah laku ini masih terjadi dalam batas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat adanya perubahan secara fisik dan psikis. Menurut Hordert perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian-kepribadian kelompok yang akhirnya si pelaku

dikenai sanksi. Keinginan yang dimaksud adalah sistem nilai dan norma yang berlaku. Menurut Lawang beranggapan bahwa perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem ini untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut Zanden perilaku menyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. Dari penjelasan beberapa di atas tentang perilaku menyimpang maka dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan hidup masyarakat.

Terjadinya perilaku penyimpangan dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.

1) Tidak adanya seseorang yang dapat dijadikan panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat; 2) Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya lingkungan yang sering terjadi tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya; 3) Proses bersosialisasi yang negatif karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya; 4) Ketidakadilan sehingga pihak-pihak yang dirugikan melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

Penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya dan pelaku penyimpangannya. 1) Berdasarkan kadar penyimpangan Berdasarkan kadarnya, penyimpangan sosial dibagi menjadi dua, seperti berikut. a) Penyimpangan primer. Penyimpangan primer disebut juga penyimpangan ringan. Para pelaku penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Penyimpangan primer dilakukan tidak secara terus-menerus (insidental) dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain, misalnya mabuk saat pesta, mencoret-coret tembok tetangga, ataupun melakukan balapan liar di jalan. Penyimpangan jenis ini bersifat sementara (temporer), sehingga orang yang melakukan penyimpangan primer masih dapat diterima oleh masyarakat. b) Penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder disebut juga penyimpangan berat. Umumnya, perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus-menerus, meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi. Bentuk penyimpangan ini mengarah pada tindak kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum atau pidana. 2) Berdasarkan pelaku penyimpangan Berdasarkan pelakunya, penyimpangan sosial dibagi menjadi tiga, seperti berikut. a) Penyimpangan individu (individual deviation). Penyimpangan jenis ini dilakukan

secara perorangan tanpa campur tangan orang lain. Contohnya seorang pejabat yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap individu yang memiliki suatu kasus, suami atau istri yang berselingkuh, dan anak yang durhaka terhadap orang tua. Dilihat dari kadarnya penyimpangan perilaku yang bersifat individual, pelakunya mendapat sebutan seperti pembandel, pembangkang, pelanggar, bahkan penjahat. b) Penyimpangan kelompok (group deviation). Penyimpangan jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya pesta narkoba yang dilakukan kelompok satu geng, perkelahian massal yang dilakukan antar kelompok suku, ataupun pemberontakan. Penyimpangan kelompok biasanya sulit untuk dikendalikan karena kelompok tersebut umumnya mempunyai nilai serta kaidah sendiri yang berlaku bagi semua anggota kelompoknya. Sikap fanatik yang dimiliki setiap anggota terhadap kelompoknya menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Hal tersebut menyebabkan penyimpangan kelompok lebih berbahaya dari pada penyimpangan individu. c) Penyimpangan campuran (mixture of both deviation). Penyimpangan campuran diawali dari penyimpangan individu. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pelaku penyimpangan dapat memengaruhi orang lain untuk ikut melakukan tindakan menyimpang seperti halnya dirinya. Contoh penyimpangan campuran adalah sindikat narkoba, sindikat uang palsu, ataupun demonstrasi yang berkembang menjadi amuk massa.

Mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan sosial pada masyarakat di lingkungan permukiman kumuh dikelurahan Baru kota Palu, dalam sudut pandang pendidikan wawasan kemasyarakatan adalah keadaan permukiman yakni salah satu faktor yang menentukan keadaan adanya urbanisasi dan perilaku menyimpang di wilayah permukiman tersebut. Seperti diketahui bahwa perumahan yang tidak cukup atau penyediaan ruangan dalam rumah hendaknya mencukupi sesuai kebutuhan. Tingginya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tempat tinggal, Hal demikian biasanya tergantung dari kebiasaan atau kemampuan dari penghuninya. Situasi urbanisasi berlebih dengan kebijakan pemerintah kota yang lebih represif dan kontradiktif. Dikemukakan oleh Soto, bahwa akibat obsesi perencanaan kota yang ingin membangun kota serba megah dan indah, sering menyebabkan mereka salah langkah (Suyanto, 2013). Kondisi yang mudah dikenali sebagai dampak dari urbanisasi berlebih tersebut adalah munculnya kawasan permukiman perkotaan yang tidak layak huni dan bahkan dapat dikatakan tidak manusiawi.

Bentuk masalah sosial pada kawasan permukiman kumuh tersebut : 1. Urbanisasi berlebih Migrasi desa kota yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya urbanisasi berlebih. Urbanisasi berlebih merupakan faktor yang memicu penambahan jumlah

penduduk di kawasan permukiman perkotaan. Urbanisasi berlebih tersebut terjadinya karena arus perpindahan penduduk yang tidak terkendali dari daerah pedesaan dan atau daerah lain; 2. Aktifitas sosial ekonomi Tumbuhnya kawasan permukiman berpengaruh pada meningkatnya aktivitas sosial dan perekonomian penduduk. Berbagai jenis aktivitas perekonomian penduduk di kawasan permukiman dapat dilihat dari pekerjaan penduduk. Jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan permukiman, pedagang dipasar, buruh, kuli bangunan, Bahkan di antaranya ada pengangguran dan setengah pengangguran. Situasi tersebut menurut Gilbert dan Gugler (2007) menggambarkan terjadinya kelebihan tenaga kerja di perkotaan. Jenis-jenis pekerjaan tersebut termasuk sektor ekonomi informal yang tidak menghendaki persyaratan pendidikan dan keahlian tertentu. Modal utamanya adalah kesehatan dan keuletan, Jenis-jenis pekerjaan tersebut termasuk jenis pekerjaan murah, sehingga memberikan penghasilan dalam bentuk upah atau gaji yang rendah. Rendahnya penghasilan di satu sisi, dan tuntutan kebutuhan hidup di sisi yang lain, memaksa masyarakat setempat pandai-pandai mengelola penghasilannya agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Strategi yang dilakukan migran untuk dapat memenuhi kebutuhan minimalnya, yaitu melibatkan seluruh anggota keluarganya dalam kegiatan ekonomi informal. Maka dari itu, ada sebagian dari masyarakat yang lebih mengutamakan mencari uang dari pada menyekolahkan anak-anaknya. Menurut mereka, anak-anaknya merupakan 'aset ekonomi keluarga', sehingga anak-anak tersebut dapat dimobilisasi untuk mengumpulkan uang bagi keluarga. Kegiatan ekonomi yang dilakukan anak-anak tersebut, antara lain menjadi pemulung, buruh pasar, buruh bangunan, kuli dan kegiatan sejenis lainnya (Suradi dan Pudjianto, 2013). Berdasarkan kondisi sosial ekonomi migran di kawasan permukiman perkotaan, dapat disimpulkan bahwa mereka pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam rumpun penduduk miskin. Berbeda dengan penduduk miskin di pedesaan, penduduk miskin di perkotaan menghadapi situasi yang lebih kompleks. Contoh situasi yang dihadapi migran, yaitu status lahan yang ditempati. Sebagian migran menempati kawasan permukiman dengan status ilegal, dan tidak dimilikinya administrasi kependudukan, dan pada akhirnya situasi ini akan membebani pemerintah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan; 3. Masalah lingkungan fisik dan Perumahan, Kemampuan ekonomi yang rendah menyebabkan migran tidak mampu menempati rumah yang layak huni. Rumah dibangun sendiri dengan bahan-bahan yang murah dan mudah rusak (kardus, triplek dan seng bekas). Rumah yang berhimpit-himpitan di kawasan permukiman tersebut biasanya tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih, drainase, dan pembuangan sampah. Kawasan permukiman biasanya pada musim hujan menjadi becek, di sana sini air tergenang dan terjadi banjir. Kondisi tersebut mengindikasikan, bahwa migran

di perumahan kumuh sangat rentan terjangkit penyakit. Dikemukakan oleh Pamekas (2013), bahwa perumahan kumuh didefinisikan sebagai lingkungan perumahan berpenghuni sangat padat, yaitu melebihi 500 orang per ha, dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Rumah-rumahnya berukuran kecil di bawah standar, serta saling berhimpitan. Rumah-rumahnya berukuran kecil di bawah standar, serta saling berhimpitan. Prasarana lingkungan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terhitung minim. Selain itu, pada umumnya perumahan kumuh menyerobot tanah negara atau tanah milik orang lain secara ilegal. Lingkungan perumahan kumuh digambarkan dengan kondisi tempat tinggal yang berdesakdesakan, luas rumah yang tidak sebanding dengan penghuninya, fungsinya hanya sebagai tempat berlindung diri dari panas dan hujan. Tata letak lingkungan perumahan tidak beraturan. Sarana dan prasarana lingkungan tidak ada atau tidak memadai. Penghuninya tidak mempunyai pendapatan tetap, serta biasanya tidak tercatat sebagai penduduk setempat. Selain itu, secara keseluruhan lingkungan permukiman rawan terhadap bahaya banjir, kebakaran dan penyakit menular. Kemudian di kemukakan oleh Grimes (Pitomo, 1995), bahwa permukiman kumuh atau slum, ditandai oleh sekelompok bangunan di suatu daerah dengan keburukan-keburukan yang berlebihan, berkondisi kurang sehat, kekurangan fasilitas.

Kondisi ini akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik dan moral penduduknya. Tumanggor (1985), menyebutkan ada beberapa ciri fisik permukiman kumuh, yaitu: a. Jarak antara satu rumah ke rumah sudah terlalu rapat, pada umumnya tidak dilengkapi sumur, WC, kamar mandi, tanpa ventilasi/jendela, dan tidak ada tempat untuk membuang sampah; b. Jumlah kamar tidur dan ruang tamu umumnya tidak lengkap dan tidak sebanding dengan jumlah penghuninya; c. Bahan bangunan rumah, atap, dinding, lantai terdiri dari bahan yang tidak kuat; d. Saluran air yang mengalirkan air dari rumah-rumah ke got induk tidak ada atau tidak berfungsi mengalirkan air, sehingga menimbulkan genangan air dan tumpukan sampah; e. Tidak dialiri aliran listrik dan cenderung gelap; f. Letak rumah tidak beraturan, sehingga terdapat kebutuhan-kebutuhan jalan di dalamnya.

Sikap mental dan perilaku sosial, Istilah mental dan pikiran 'kumuh' ini diadaptasi dari pemikiran Pamekas (2013) dalam memahami berbagai permasalahan yang ada kawasan permukiman perkotaan. Dikemukakan oleh Pamekas (2013), bahwa rumah kumuh membuat pikiran kumuh. Membiarkan rumah dan lingkungan kumuh, secara tidak langsung sama dengan mengkondisikan pikiran, mental dan moral penghuninya agar "kumuh". Bertolak dari pemikiran Pamekas tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan permukiman perkotaan yang kumuh, akan berdampak pada sikap mental dan perilaku sosial penduduknya. Orang-orang di kawasan permukiman kumuh, menampilkan sikap mental dan perilaku sosial yang

seringkali tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Sikap mental dan perilaku sosial yang ditampilkan seperti: merusak fasilitas umum, minum minuman keras, berjudi, pemerasan, tindak kekerasan, kata-kata kasar dan jorok, dan eksploitasi anak.

Upaya atau intervensi pemerintah dalam pendidikan wawasan kemasyarakatan tersebut : 1. Relokasi, pemulangan dan transmigrasi (eksitu) Pada program ini dilakukan pemindahan penduduk dari kawasan permukiman. Kawasan ini biasanya ilegal, di mana penduduk tidak memiliki bukti-bukti administrasi atas kepemilikan lahan kawasan yang ditempati. Alternatif yang dapat dilakukan pada model eksitu, yaitu : a. Memindahkan penduduk ke rumah susun yang disediakan pemerintah kota. Pembangunan kawasan permukiman dengan program rumah susun (Rusun) sederhana dengan harga yang dapat dijangkau migran yang kondisi sosial ekonominya tergolong rendah. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk memastikan, bahwa penduduk yang tinggal di rumah susun adalah mereka yang masuk pada program relokasi. Selain itu, pemerintah kota juga bertanggung jawab untuk memastikan, bahwa jaringan sosial ekonomi di rumah susun dapat diteruskan dan dikembangkan. Jangan sampai penduduk mengalami shock karena di lingkungan baru tanpa jaringan sosial ekonomi; Pemulangan penduduk ke tempat asal, perlu melibatkan kabupaten/kota asal migran yang mendiami kawasan permukiman ilegal. Perlu dibangun kerjasama untuk memastikan bahwa penduduk yang kembali ke tempat asal tersebut tidak kembali atau bermigrasi ke kota lagi. Dipastikan bahwa mereka mau melanjutkan kehidupannya di tempat asal dengan modal kerja (pelatihan keterampilan, modal usaha) yang sudah disiapkan pemerintah kota; c. Penduduk disertakan pada program transmigrasi, penyertaan migran pada program transmigrasi perlu dilakukan secara sinergis dengan instansi terkait dan pemerintah daerah yang menjadi tujuan transmigran. Program transmigrasi ini dimungkinkan tidak hanya di sektor pertanian, akan tetapi juga di sektor-sektor lain seperti: perikanan, kehutanan, perkebunan dan perindustrian; 2. Pelayanan dan bantuan sosial. Pelayanan dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : a. Penyuluhan sosial, diarahkan pada pemberian pemahaman kepada penghuni kawasan permukiman, bahwa mereka membangun kawasan permukiman yang melanggar peraturan perundang-undangan. Melalui penyuluhan sosial, penghuni diharapkan menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, bersedia membongkar/memperbaiki tempat tinggalnya dan atau mendukung pembongkaran oleh petugas yang berwenang; b. Bimbingan sosial diarahkan pada perubahan sikap mental dan perilaku migran agar mereka memiliki pemahaman tentang lingkungan permukiman yang sehat, dan termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan menuju hidup bersih, sehat dan sejahtera. Bimbingan

sosial ini diberikan pada model insitu maupun program eksitu/semua program; 3. Pelatihan usaha diarahkan untuk membuka usaha baru dan atau mengembangkan atau penguatan usaha migran yang selama ini sudah berjalan. Bimbingan dan pelatihan meliputi bimbingan manajemen usaha, dan keterampilan kerja (vokasional) berdasarkan minat dan pertimbangan pasar. Pada bimbingan dan pelatihan usaha ini, diberikan bantuan modal usaha, baik untuk membuka usaha baru atau pengembangan/penguatan usaha yang sudah ada. Pelatihan usaha ini diberikan pada model insitu maupun program eksitu/semua program; 4. Pelayanan akses dimaksudkan agar penduduk di kawasan permukiman terakses dengan bantuan pendidikan (KIP) dan pelayanan kesehatan (KIS) serta bantuan sosial lainnya (KSKS dan KKS). Berkaitan dengan kartu-kartu tersebut, persyaratan bagi mereka yang tidak memiliki identitas kependudukan dapat diatasi dengan surat keterangan dari pemerintah kota atau pejabat yang berwenang. Pelayanan akses ini diberikan pada program insitu maupun eksitu/khusus pada program rumah susun; 5. Pendampingan sosial diarahkan untuk memberikan kesadaran, pengetahuan baru, menjangkau dengan pemilik sumber dan memberikan dorongan agar migran mau melakukan perubahan. Pendampingan ini dilakukan dalam mekanisme kelompok. Pendamping dari unsur pekerja sosial pada model insitu, relokasi dan kembali ke tempat asal. Sedangkan bagi mereka yang mengikuti program transmigrasi, disediakan pendamping lapangan khusus di lokasi transmigrasi. Pendampingan ini diberikan pada program insitu maupun eksitu/ khusus pada program rumah susun, dan transmigrasi; 6. Bantuan sarana prasarana diarahkan pada penataan lingkungan permukiman menuju permukiman dan perumahan yang bersih dan sehat. Pada model insitu, intervensi dilakukan di kawasan permukiman penduduk. Sarana prasarana yang diperlukan seperti: jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah, drainase dan MCK umum. Selain itu bantuan sarana prasarana yang berkaitan dengan tempat ibadah, tempat rekreasi warga (taman warga), taman bacaan dan sarana olah raga. Bantuan sarana prasarana tersebut tentu mempertimbangkan ketersediaan dan kelayakan lahan di kawasan permukiman.

SIMPULAN

Masalah kawasan permukiman kumuh di Kelurahan baru kota Palu merupakan suatu penelitian deskriptif analisis kualitatif dimana menggambarkan fenomena, yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Masyarakat dalam konteks pendidikan wawasan kemasyarakatan adalah agen (pelaksana) tujuan dan sekaligus sebagai fasilitator dalam proses pendidikan. Implementasi pendidikan berbasis masyarakat diharapkan setiap anggota masyarakat dapat

belajar bersama, para guru, dewan pendidikan, pengelola dan pelajar adalah semua anggota masyarakat dari semua generasi. Untuk dapat menilai bahwa suatu permukiman sehat atau tidak perlu didasarkan pada karakteristik daerah permukiman yang merupakan standar yang telah disepakati Akibat dari semua kenyataan di atas adalah semakin beratnya beban yang dipikul oleh permukiman yang bersangkutan dan semakin sulitnya mengendalikan situasi di dalamnya secara keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejadian tersebut telah menciptakan permasalahan permukiman kumuh yang semakin rumit dari waktu ke waktu. Banyaknya permasalahan yang melatar belakangi munculnya permukiman kumuh, sehingga perlu diketahui permasalahan spesifik dan program pengendalian permukiman kumuh di Kelurahan Baru kota Palu ditinjau dari perspektif Pendidikan wawasan kemasyarakatan, sehingga dapat dibuat strategi penanganan permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2014. *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bani Putri, Baiguni. 2015. *Jurnal Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Hatimah, Ihat, dkk. 2007. *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- I Wayan Suwendra. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. *Arahan dan Kebijakan Penanganan dan Permukiman Kumuh*. Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta karya.
- Kompas.com. 2014. Bappenas: *Masih ada 38.431 Hektar Kawasan Kumuh di Indonesia*, Jakarta, Selasa 23 Desember 2013.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Taman Siduarjo: Zilfatama Jawa.
- Paulus Hariyono. 2017. *Sosiologi kota untuk arsitek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Raudina Cristy. 2019. *Jurnal Penataan Permukiman Kumuh Dengan Teknoogi Risha di kampung Deret Petagogan Jakarta Selatan*. Jakarta Selatan : Universitas Gunadarma.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2016. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Silvia, Charitas. 2019. *Jurnal Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG pada Kota Magelang*. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

- Soyomukti, Nurani. 2017. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-masalah sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-kajian Strategis*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Syaidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Taman Siduarjo: Zilfatama Jawara.
- Wajib, Nurwino. 2016. *Alternatif Model Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh*. Jurnal, Medan.
- Widodo, Eko. 2016. *Pengembangan Atraksi Wisata Tanjung karang Sebagai Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Donggala*. Tesis Tidak di Publikasikan. Program Studi Pembangunan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Zubaedi M.Ag, M.Pd.2009. *Pembelajaran Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : pustaka pelajar.